

Daftar Isi
Jurnal **Masyarakat dan Budaya**
Volume 18 No. 2 Tahun 2016

	Halaman
Pengantar Redaksi	iii
Topik:	
☞ Afirmasi Nilai Estetika, Etika, dan Sosial Kesenian Gong Gumbeng di Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo <i>Ayyu Subhi Farahiba</i>	157
☞ Syekh Yusuf dan (Hasrat) Perjalanan Haji ke Puncak Bawa Karaeng <i>Irfan Palippui</i>	173
☞ Eksplorasi Atas Praktik dan Nilai-nilai Demokrasi dalam Kerajaan Wajo' Abad Ke-15/16 dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Demokrasi Modern <i>Wahyuddin Halim</i>	187
☞ Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan <i>Retty Isnendes</i>	203
☞ Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre <i>Sihol Farida Tambunan</i>	215
☞ Peranan Pelaut dalam Reproduksi Wawasan Kesatuan Geo-Sosial-Budaya Maritim Nusantara: Belajar dari Nelayan Pengembarta Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan <i>Munsi Lampe</i>	233
☞ Penerapan Program Minapolitan Perikanan Tangkap dalam Memberdayakan Nelayan Kecil di Kabupaten Sukabumi <i>Masyhuri Imron</i>	249
☞ Strategi Adaptasi Nelayan Desa Tanjung Berakit dalam Menghadapi Perubahan Iklim <i>Sudiyono</i>	263
☞ Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan: Sebuah Refleksi Sosiologis <i>Ida Ruwaida</i>	283
☞ <i>Understanding Positive Measures in an Equality Framework on the Ground of Disability</i> <i>Yeni Rosdianti</i>	293
Tinjauan Buku:	
☞ The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin) <i>Luis Feneteruma</i>	311

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Jurnal Masyarakat dan Budaya Volume 18 No. 2 Tahun 2016 hadir dengan menyuguhkan sepuluh artikel. Dari sepuluh artikel terdapat lima artikel yang mengupas nilai-nilai sosial-budaya, sejarah dan etika-filsafat. Tulisan pertama dibuka dengan karya **Ayyu Subhi Farahiba** tentang afirmasi nilai-nilai estetika, etika, dan sosial yang terdapat di dalam kesenian *Gong Gumbeng* di Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ada tiga hal penting yang dimuat dalam artikel ini. Pertama, nilai estetika kesenian *Gong Gumbeng* tercermin dari peralatan *Gong Gumbeng*, *tayub*, dan *tembang macapat*. Kedua, nilai etika kesenian *Gong Gumbeng* tampak sebagai wujud cerminan sikap hormat masyarakat kepada leluhurnya atas perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan. Iringan kesenian *Gong Gumbeng* menyampaikan pesan yang berisi nasihat yang berguna bagi masyarakat. Ketiga, nilai sosial yang tampak pada kesenian ini adalah munculnya nilai kegotongroyongan dan kerukunan masyarakat sehingga memperkuat solidaritas sosial.

Sajian kedua, tulisan **Irfan Palippui** tentang makna pengalaman spiritual dari perjalanan haji Syekh Yusuf ke Puncak Bawa Karaeng. Tulisan ini menggunakan psikoanalisis Lacanian untuk menggeledah *symptom* perhajian ke Puncak Bawa Karaeng. Kesimpulan dari tulisan ini menyebutkan bahwa perjalanan haji Syekh Yusuf merupakan bentuk artikulasi dari jemaat Haji Bawa Karaeng, yang sedang menjalankan tarekat Syekh Yusuf sebagai jalan *salik* dalam menuju haji yang sesungguhnya-haji sebagai jalan pulang ke hadirat Ilahi.

Tulisan ketiga adalah karya **Wahyuddin Halim** tentang eksplorasi atas praktik dan nilai-nilai demokrasi dalam kerajaan historis Wajo' abad ke-15/16 dan kompatibilitasnya dengan sistem demokrasi modern. Tulisan ini menggali praktik nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik dari kerajaan Bugis tradisional Wajo' di Sulawesi Selatan, antara lain disebutkan bahwa praktik dasar demokrasi dalam sistem politik dan moral (*pangngadereng*) seperti pengakuan dan penghormatan kerajaan atas hak-hak kebebasan rakyatnya, adanya kebebasan berbicara, adanya dewan pertuanan tertinggi yang agak menyerupai dewan perwakilan rakyat di sistem demokrasi politik modern, sistem pemilihan raja dan kesamaan hak semua orang di hadapan hukum.

Retty Isnendes, merekam sebuah perjalanan politik masyarakat adat sunda wiwitan. Penulis mengangkat upacara *seba* yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy yang diasumsikan sebagai perjalanan politik tradisional yang telah dilakukan berabad-abad lamanya, semenjak kesultanan Banten berdiri mengangkat upacara *seba* yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy yang diasumsikan sebagai perjalanan politik tradisional yang telah dilakukan berabad-abad lamanya, semenjak kesultanan Banten berdiri.

Artikel selanjutnya adalah filsafat Eksistensialisme Sartre. Tulisan **Sihol Farida Tambunan** mengupas tentang kebebasan individu manusia abad dua puluh dari filsafat Eksistensialisme Sartre. Jean-Paul Sartre, filsuf Perancis yang terkenal adalah salah satu pemikir eksistensial yang membicarakan manusia sebagai subjek yang eksistensial. Menurutnya, eksistensialisme juga merupakan filsafat tentang 'ada', tapi dia menolak untuk membakukannya menjadi satu-satunya hakikat pemikiran. Ia menganggap bahwa eksistensialisme merupakan pengalaman personal manusia sebagai subjek. Subjektivitas manusia menjadi fokus pemikiran yang melahirkan aliran ilmu pengetahuan terbaru yaitu psikologi.

Berikutnya artikel tentang dunia maritim yang ditulis oleh Munsu Lampe, Masyhuri Imron, dan Sudiyono. **Munsu Lampe** memaparkan masih kurangnya kajian masyarakat maritim di Indonesia yang mengabaikan aspek-aspek kepelayaran dan interaksi kemaritimannya karena hal ini merupakan kunci menemukan inti dan karakteristik umum budaya maritim di dunia. Selama ini kajian masyarakat maritim di Indonesia menunjukkan kecenderungan pilihan subjek pada komunitas-komunitas nelayan dengan fokus studi pada aspek-aspek institusi, sosial-ekonomi, teknologi penangkapan ikan, dan modernisasi teknologi perikanan laut (dengan kapitalisme dan pasar global) serta dampak kemiskinan penduduk nelayan dan kerusakan lingkungan.

Tulisan berikutnya adalah karya **Masyhuri Imron**. Tulisan ini membahas penerapan program minapolitan perikanan tangkap dalam memberdayakan nelayan kecil di Kabupaten Sukabumi. Tulisan ini menunjukkan bahwa kegiatan di dalam program Minapolitan di Sukabumi belum fokus. Semua yang terkait dengan masalah perikanan dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan, bahkan program yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah perikanan tangkap. Jadi tidak ada perbedaan antara program Minapolitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan program pembangunan pesisir. Program bantuan permodalan dan peralatan tangkap untuk nelayan kecil belum diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan. Dengan demikian pemberdayaan nelayan kecil di dalam program Minapolitan masih terlepas dari tujuan program Minapolitan di daerah ini, yaitu meningkatkan produksi empat jenis komoditas ikan unggulan, yaitu Tuna, Tongkol, Cakalang, dan Layur. Sementara itu, tulisan **Sudiyono** mendiskusikan strategi adaptasi yang dilakukan oleh nelayan di Desa Tanjung, Perairan Bintan, Kepulauan Riau dalam menghadapi perubahan iklim. Strategi tersebut terlihat dari cara nelayan memilih lokasi pemukiman maupun cara mengembangkan alat tangkap ikan,

Tema berikut adalah soal kelompok sosial yang marjinal, yaitu perempuan dan penyandang disabilitas. Pertama, tulisan **Ida Ruwaida** menfokuskan perhatian pada aksi kolektif perempuan dalam upaya pemberdayaan ekonominya melalui program penanggulangan kemiskinan. Berdasar kajian terefleksi bahwa kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan masih belum menstimuli kapasitas dan kesadaran kritis perempuan, baik secara individual maupun kolektif. Artinya, perempuan masih diposisikan dengan peran instrumentalnya, bukan peran substantif/transformatifnya. Menariknya, ada kecenderungan program-program yang ada justru memfragmentasi perempuan. Hal ini dimungkinkan ketika kebutuhan dan kesadaran perempuan untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan kepentingan bersama masih lemah. Pada sejumlah kasus, aksi kolektif perempuan sangat diwarnai oleh keberadaan figur yang memiliki kapasitas individual sebagai agen perubahan. Aktor perempuan ini mampu melakukan transformasi institusional, meski berhadapan dengan tantangan struktural dan kultural. Secara sosiologis, menarik mengungkap strategi agensi perempuan dalam menyikapi tantangan-tantangan struktural maupun kultural.

Artikel terakhir disajikan oleh **Yeni Rosdianti** bertema diskriminasi penyandang disabilitas sebagai buah dari *stereotype* dan stigmatisasi di tengah masyarakat yang maujud dalam bentuk pandangan yang keliru tentang penyandang disabilitas. Menurut penulis, pendekatan belas kasih tidak cukup bagi kaum disabilitas. Oleh karena itu, sebuah pandangan berbasis hak yang bersendikan Hak Asasi Manusia (HAM) ditekankan untuk dapat menjadi solusi mengatasi diskriminatif para penyandang disabilitas sehingga dapat mengakses secara wajar kehidupan dan hak-haknya sebagaimana hak-hak non-disabilitas.

Selamat membaca, kiranya tulisan-tulisan dalam edisi ini dapat menjadi acuan bagi pemerhati masalah-masalah terkait.

Selamat membaca.

**AFIRMASI NILAI ESTETIKA, ETIKA, DAN SOSIAL KESENIAN
GONG GUMBENG DI DESA WRINGINANOM,
KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO**

Ayyu Subhi Farahiba
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo
aiiusubhi.spd@gmail.com

Abstrak

Di tengah pesatnya perkembangan budaya asing di Indonesia, terdapat salah satu budaya daerah yang patut dilestarikan dan dijaga. Budaya daerah tersebut adalah kesenian *Gong Gumbeng*. Kesenian ini hanya dapat ditemukan di desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Kesenian *Gong Gumbeng* menjadi bagian dari ritual bersih desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengafirmasi nilai-nilai estetika, etika, dan sosial yang terdapat di dalam kesenian *Gong Gumbeng*. Penelitian telah menemukan tiga hal penting. *Pertama*, nilai estetika kesenian *Gong Gumbeng* tercermin dari peralatan *Gong Gumbeng*, *tayub*, dan *tembang macapat*. *Kedua*, nilai etika kesenian *Gong Gumbeng* tampak sebagai wujud cerminan sikap hormat masyarakat kepada leluhurnya atas perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan. *Iringan kesenian Gong Gumbeng* menyampaikan pesan yang berisi nasihat yang berguna bagi masyarakat. *Ketiga*, nilai sosial yang tampak pada kesenian ini adalah munculnya nilai kegotongroyongan dan kerukunan masyarakat sehingga memperkuat solidaritas sosial.

Kata kunci: *Gong Gumbeng*, estetika, etika, sosial, Ponorogo.

**SYEKH YUSUF DAN (HASRAT) PERJALANAN HAJI
KE PUNCAK BAWA KARAENG**

Irfan Palippui
Dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar, Makassar
irfanpalippui@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menggunakan psikoanalisis Lacanian untuk menggeledah gejala (*symptom*) perhajian ke Puncak Bawa Karaeng. Hasrat yang mendorong subjek berhaji ke Puncak Bawa Karaeng berasal dari kisah pengalaman spiritual yang dialami oleh Syekh Yusuf saat melangsungkan perjalanan pengetahuan (*alliungi panggisengang*) ke Puncak Bawa Karaeng, lalu ke Mekah. Kisah inilah yang diterjemahkan ulang oleh pengikut Yusuf, sebagai penanda dalam mengidentifikasi diri – yang sedang melakukan fase perjalanan haji. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, perjalanan haji ke Puncak Bawa Karaeng adalah bentuk artikulasi dari jemaat Haji Bawa Karaeng, yang sedang menjalankan tarekat Syekh Yusuf sebagai jalan *salik* dalam menuju haji yang sesungguhnya – haji sebagai jalan pulang ke hadirat Ilahi.

Kata kunci: *Haji Bawa Karaeng*, gejala (*symptom*), Hasrat dan Islam-Sang-Yusuf.

EKSPLORASI ATAS PRAKTIK DAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KERAJAAN WAJO' ABAD KE-15/16 DAN KOMPATIBILITASNYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI MODERN

Wahyuddin Halim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
wahyuddin.halim@anu.edu.au

Abstrak

Tulisan ini menggali praktik nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik dari kerajaan Bugis tradisional Wajo' di Sulawesi Selatan selama era kejayaannya pada sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Lama sebelum nilai-nilai yang kurang lebih sama dipraktikkan di Eropa pada abad ke-18, nilai-nilai tersebut telah menjadi sistem kerajaan di Wajo', dan membuatnya menjadi kerajaan yang cukup unik di antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya di bagian selatan Pulau Sulawesi. Beberapa sarjana telah menyebut Wajo' sebagai 'kerajaan aristokratik demokratis' (Pelras, 2006), 'republik aristokratis' (Mattulada, 1991a) dan 'kerajaan demokratis' (Abidin, 1983). Berdasarkan atas pembacaan cermat atas sejumlah manuskrip tradisional (Bugis: *Lontara*'), sebagaimana ditransliterasi dan diulas oleh beberapa pakar sejarah dan budaya Bugis, penulis mendeskripsikan beberapa praktik dasar demokrasi dalam sistem politik dan moral (*pangngadereng*) seperti pengakuan dan penghormatan kerajaan atas hak-hak kebebasan rakyatnya, adanya kebebasan berbicara, adanya dewan pertuanan tertinggi yang agak menyerupai dewan perwakilan rakyat di sistem demokrasi politik modern, sistem pemilihan raja dan kesamaan hak semua orang di hadapan hukum.

Kata kunci: Demokrasi, Kearifan Lokal, Sistem Politik, Kerajaan Wajo', Kebebasan

UPACARA SEBA BADUY: SEBUAH PERJALANAN POLITIK MASYARAKAT ADAT SUNDA WIWITAN

Retty Isnendes

JPBD UPI Bandung
retty.isnendes@upi.edu; chyerettyisnendes@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengangkat upacara seba yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy yang diasumsikan sebagai perjalanan politik tradisional yang telah dilakukan berabad-abad lamanya, semenjak kesultanan Banten berdiri. Tujuan tulisan ini adalah: memaparkan teks (peristiwa upacara), mendeskripsikan ko-teks, dan konteks upacara seba. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, dan perekaman. Pengolahan data dilakukan dengan transkripsi, analisis, dan interpretasi. Data yang dikumpulkan adalah upacara *seba leutik* (seba kecil) pada tanggal 01 s.d. 05 Mei 2014 dan *seba ageung* (seba besar) pada tanggal 23-26 April 2015. Hasilnya adalah bahwa upacara seba dilakukan pada waktu bersamaan oleh masyarakat Baduy (dalam dan luar) dengan tata cara yang berbeda. Hal yang membedakannya adalah adanya *lalampah* yang dilakukan oleh orang Baduy Dalam dengan berjalan kaki menuju kota Kabupaten dan Propinsi, sedangkan orang Baduy Luar menggunakan kendaraan. Upacara seba terdiri atas *seba ageung* (seba raya/besar) dan *seba leutik* (seba kecil) yang dilakukan selang setahun sekali. Seba adalah menyerahkan tanda penghormatan dan penghargaan masyarakat Baduy sebagai 'nu tapa di mandala' (yang bertapa di tanah suci) pada mereka 'nu tapa di nagara' (yang bertapa di negara). Dengan tanda politis tersebut, mereka berharap haknya terpenuhi atas perlindungan tanah ulayat dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal-hal yang menyertai teks seba adalah barang-barang yang berupa hasil ritual suci *kawalu*, yaitu *laksa* dan hasil bumi, juga tuturan *rajah* (mantra) dan pidato tradisional.

Kata kunci: Seba Baduy, politik tradisional, Sunda wiwitan

KEBEBASAN INDIVIDU MANUSIA ABAD DUA PULUH: FILSAFAT EKSISTENSIALISME SARTRE

Sihol Farida Tambunan

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI
tsiholfarida@gmail.com

Abstrak

Eksistensialisme merupakan sebuah label yang diberikan terhadap banyak pemikiran filsafat yang berkembang pada Perang Dunia I dan II. Aliran ini mendobrak aliran pemikiran tradisional sebelumnya yaitu Esensialisme yang hanya menganggap empirisme dan rasionalisme serta ontologi rasional tentang 'ada' sebagai hakikat pemikiran. Pemikir-pemikir tradisional telah menyepakati untuk menghilangkan setiap kemungkinan yang mengubah pertanyaan tentang 'ada'. Pemikir-pemikir Eksistensialis melakukan revolusi terhadap para Filsuf Esensialis yang telah berkembang selama berabad-abad sejak zaman Plato dan Aristoteles sebagai suatu bentuk filsafat yang deterministik. Jean-Paul Sartre, filsuf Perancis yang terkenal adalah salah satu pemikir Eksistensialis yang membicarakan manusia sebagai subjek yang eksistensial. Menurutnya, Eksistensialisme juga merupakan filsafat tentang 'ada', tetapi dia menolak untuk membakukannya menjadi satu-satunya hakikat pemikiran. Ia menganggap bahwa Eksistensialisme merupakan pengalaman personal manusia sebagai subjek. Dia menyebut '*etre-en soi*' terhadap objek kesadaran manusia dan '*etre-pour soi*' terhadap kesadaran manusia itu sendiri. Tujuan kesadaran manusia menurut Sartre adalah menjadi '*etre-en soi- etre-pour soi*' atau 'kesadaran yang penuh pada dirinya.' Subjektivitas manusia menjadi fokus pemikiran yang melahirkan aliran ilmu pengetahuan terbaru yaitu Psikologi.

Kata kunci: Eksistensialisme, Anti Deterministik, Perang Dunia, Psikologi, Subjektivisme, Ada dan tiada (*L'Etire et le Neant*).

PERANAN PELAUT DALAM REPRODUKSI WAWASAN KESATUAN GEO-BIO-SOSIAL-BUDAYA MARITIM NUSANTARA: BELAJAR DARI NELAYAN PENGEMBARA BUGIS-MAKASSAR DI SULAWESI SELATAN

Munsi Lampe

Dosen Tetap pada Departemen Antropologi Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar
munsilampe257@gmail.com

Abstrak

Bacaan tentang masyarakat maritim di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan pilihan subjek pada komunitas-komunitas nelayan dengan fokus studi pada aspek-aspek institusi, sosial-ekonomi, teknologi penangkapan ikan, dan modernisasi teknologi perikanan laut (dengan kapitalisme dan pasar global) serta dampak kemiskinan penduduk nelayan dan kerusakan lingkungan. Sayangnya, kajian yang ada cenderung mengabaikan aspek-aspek pelayaran dan interaksi kemaritimannya yang justru merupakan kunci menemukan inti dan karakteristik umum budaya maritim di dunia. Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim ke-Nusantara-an dari nelayan pengembara Bugis-Makassar dalam konteks pelayaran dan interaksi kemaritimannya dengan lingkungan laut dan kelompok nelayan lainnya di Indonesia. Sumber data untuk penulisan artikel ini diambil secara selektif dari beberapa laporan penelitian, khususnya "*Studying the Institution and Maritime Cultural Concept of Buginese-Makassarese, Mandarese, and Butonese Seaman Supporting the Strength of National Integration and Social Harmony*" (LPPM Unhas, 2010) di mana penulis terlibat aktif sebagai koordinator maupun anggota tim peneliti. Melalui aplikasi model analisis "navigasi dan reproduksi wawasan geo-bio-sosial-budaya maritim" yang baru, empat tema wawasan budaya maritim ke-Nusantara-an yang dimiliki nelayan pengembara Bugis-Makassar dapat diidentifikasi, yaitu (1) wawasan tentang lingkungan geo-bio-iklim perairan Nusantara, (2) wawasan tentang laut dan isinya sebagai ruang terbuka-tertutup, (3) wawasan tentang keanekaragaman suku bangsa laut dan budaya maritimnya, dan (4) konsep kesatuan Tanah Air dan Bangsa Maritim Nusantara.

Kata kunci: kepelautan nelayan pengembara Bugis-Makassar, reproduksi wawasan kesatuan geo-bio-sosial-budaya maritim Nusantara, Indonesia

PENERAPAN PROGRAM MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DALAM MEMBERDAYAKAN NELAYAN KECIL DI KABUPATEN SUKABUMI

Masyhuri Imron

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
Anggota Kelompok Studi Maritim
mr_hoeng@yahoo.com

Abstrak

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan, dengan komoditas unggulan berupa perikanan. Program Minapolitan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi perikanan unggulan, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tulisan ini untuk melihat penerapan program Minapolitan di Kabupaten Sukabumi, apakah sudah diarahkan untuk memberdayakan nelayan kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di dalam program Minapolitan di Sukabumi belum fokus. Semua yang terkait dengan masalah perikanan dianggap sebagai bagian dari program Minapolitan, bahkan program yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah perikanan tangkap. Jadi tidak ada perbedaan antara program Minapolitan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan program pembangunan pesisir. Program bantuan permodalan dan peralatan tangkap untuk nelayan kecil belum diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan. Dengan demikian, pemberdayaan nelayan kecil di dalam program Minapolitan masih terlepas dari tujuan program Minapolitan di daerah ini, yaitu meningkatkan produksi empat jenis komoditas ikan unggulan, yaitu Tuna, Tongkol, Cakalang dan Layur.

Kata kunci: Minapolitan, Perikanan Tangkap, Pemberdayaan, Nelayan Kecil.

STRATEGI ADAPTASI NELAYAN DESA TANJUNG BERAKIT DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

Sudiyono

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
sudiyono.suwito@gmail.com

Abstrak

Perubahan iklim (*climate change*) sebagai dampak dari pemanasan global (*global warming*), telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional, maupun di tingkat internasional. Dampak luas perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup makhluk di bumi, telah menarik perhatian orang dari berbagai kalangan masyarakat, para akademisi, pegiat lingkungan yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pejabat pemerintah terkait yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17000 pulau dan panjang pantai 81.000 km, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Komunitas nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pertanyaannya, bagaimana strategi nelayan Tanjung Berakit Bintang Kepulauan Riau menghadapi perubahan iklim yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini? Penelitian terhadap masalah itu dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, pengamatan dan diskusi terbatas kepada para nelayan dan para pihak lain yang terlibat dalam kehidupan para nelayan di Tanjung Berakit itu. Penelitian telah menemukan bahwa kehidupan mereka sangat rentan terhadap berbagai bentuk fenomena perubahan lingkungan. Mereka juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat berbagai keterbatasan yang membelit dirinya, seperti rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terbatasnya akses informasi yang dapat menolong dirinya, terbatasnya modal finansial, terbatasnya kepemilikan dan penguasaan aset produksi, kesemuanya telah berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan adaptasi nelayan. Berbagai strategi menghadapi kerentanan itu dilakukan dengan cara, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut selain ikan, mengembangkan secara maksimal bantuan dan program yang diberikan pihak pemerintah dan pihak lain, dan memanfaatkan jaringan tradisional dalam menjaga pemenuhan kebutuhan mereka mereka, walaupun masih sebatas pemenuhan kebutuhan pokok.

Kata kunci: nelayan, adaptasi, perubahan iklim

PEMBERDAYAAN DAN AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN: SEBUAH REFLEKSI SOSIOLOGIS

Ida Ruwaida

Departemen Sosiologi, FISIP UI
Idar.noor@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan perhatian pada aksi kolektif perempuan dalam upaya pemberdayaan ekonominya melalui program penanggulangan kemiskinan. Berdasar kajian terefleksi bahwa kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan masih belum menstimuli kapasitas dan kesadaran kritis perempuan baik secara individual maupun kolektif. Artinya, perempuan masih diposisikan dengan peran instrumentalnya, bukan peran substantif/transformatifnya. Menariknya, ada kecenderungan program-program yang ada justru menfragmentasi perempuan. Hal ini dimungkinkan ketika kebutuhan dan kesadaran perempuan untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan kepentingan bersama masih lemah. Pada sejumlah kasus, aksi kolektif perempuan sangat diwarnai oleh keberadaan figur yang memiliki kapasitas individual sebagai agen perubahan. Aktor perempuan ini mampu melakukan transformasi institusional, meski berhadapan dengan tantangan struktural dan kultural. Secara sosiologis, menarik mengungkap strategi agensi perempuan dalam menyikapi tantangan-tantangan struktural maupun kultural.

Kata kunci: Aksi kolektif perempuan, agensi perempuan, pemberdayaan ekonomi, peran instrumental, peran substantif/transformatif, transformasi institusional.

UNDERSTANDING POSITIVE MEASURES IN AN EQUALITY FRAMEWORK ON THE GROUND OF DISABILITY

Yeni Rosdianti

Researcher of The National Commission on Human Rights Republic of Indonesia
y.rosdiantil@nuigalway.ie

Abstract

Persons with disabilities have mostly been experienced a long history of discrimination, exclusion, deprived of liberty, and even dehumanization. A sequence of various stigmatisation and stereotype concerning disability were taken into account. They have been suffered from discrimination on both direct and indirect ways. It was a social model of disability which subsequently led to human rights based approach of disability; appoint a new horizon to perceive disability within a comprehensive pathway in the society as a whole. It comes from human rights values which accented on equality and non-discrimination as the main principles of human rights. Equality in terms of substantive equality model drives its robust landscape of disability in light of protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities as disadvantaged group, toward the uttermost participation in the society. Substantive equality is the notion of worth and benevolence. It is sustain to conferring the positive measures as a means to achieve the genuine equality of persons with disabilities, as well as a driving force to make their rights real.

Keywords: *Persons with Disabilities; Positive Measures; Equality; Human Rights*

